

Orasi Budaya

Hari Kebangkitan Nasional

Gedung Stovia

20 Mei 2009

Hari ini kita berkumpul di gedung bersejarah ini antara lain untuk mengenang para korban tragedi Mei 98. Marilah kita luangkan satu menit hening untuk mengingat perjuangan mereka demi sebuah Indonesia yang bebas, adil, terbuka dan lepas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan ...

.....

Saudara-saudara yang saya hormati:

Saya salah satu dari jutaan orang yang bangga menjadi orang Indonesia. Telah dicatat dengan baik oleh sejarah bahwa Indonesia adalah sebuah republik dengan 17 ribu pulau yang tahan dalam persatuan bukan karena kekuatan militernya. Adanya satu bahasa yang digunakan oleh berpuluh-puluh wilayah dan suku bangsa yang berbeda – sebuah bahasa yang tidak dipaksakan oleh mayoritas, bahkan sebuah bahasa yang dikembangkan oleh

kalangan yang dulu disebut sebagai keturunan “asing” – merupakan prestasi yang tak dapat dipungkiri.

Tapi akhir-akhir ini kata nasionalisme sering membuat saya terpekur. Setiap kali saya mendengar kata itu, saya ingat setidaknya tiga pengalaman.

Yang pertama terjadi suatu petang di bulan Juli 2006. Saya dan sejumlah kawan sedang duduk di sebuah restoran di puncak bukit di Ambon. Esoknya kami berniat berlayar ke Pulau Buru. Bersama kami seorang ibu separuh baya—ia mantan kepala Badan Urusan Logistik daerah—dan adik laki-lakinya. Keduanya bermata sipit, dengan tutur kata lembut. Mereka bicara tentang kekerasan antar agama di Maluku: tentang hamparan mayat, tentang tetangga yang saling membantai, tentang kota yang terbelah menjadi merah dan putih.

Mereka menyesali pertumpahan darah di bumi Maluku. “Nama keluarga kami Chua.” Kata perempuan itu. “Kami berdua Muslim keturunan Cina. Keluarga besar kami menamakan diri Marga Ambon, dan kami adalah generasi kelima. Berabad-abad kami hidup dengan perbedaan. Bhineka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan.”

Pengalaman kedua: Hari Kartini, tiga bulan sebelumnya, di Jakarta. 6000 manusia, mayoritas perempuan, berpawai dari Lapangan Monas ke Bunderan Hotel Indonesia. Meski mereka turun ke jalan untuk menentang rancangan undang-undang pornografi yang mengancam kebhinekaan Indonesia, ini sebuah aksi damai. Suasana karnaval sangat kental. Pakaian mereka dari Sabang sampai Merauke. Ada tari singa Cina, ada kelompok waria, ada penari sing sing berbalut celana pendek. *Hidup Pancasila! Hidup Bhineka Tunggal Ika! Marilah kita rayakan kemajemukan Indonesia!* Demikian mereka bersorak.

Hadirin yang saya hormati,

Tak banyak yang ingat bahwa pada suatu hari di tahun 1962, dari Hotel Indonesia berkumandang hingar-bingar nasionalisme. Dalam acara peresmian hotel itu, Presiden Sukarno menggelar sebuah pentas akbar berjudul Bhineka Tunggal Ika. Pagelaran 80 menit itu terdiri dari 12 tari tradisional yang masing-masing diperpendek menjadi tujuh menit dengan harapan ia akan lebih mudah dicerna oleh penonton asing dan ibukota.

Kita tahu, Bung Karno di tahun-tahun itu mulai menjadi seorang penguasa yang otokratik. Tapi ia tetap seorang pemersatu. Bagi Sukarno, dengan segala cacat dan musykilnya, persatuan di atas segala-galanya.

Bagi saya, yang lebih menarik tentang retorika nasionalisme Hotel Indonesia saat itu adalah eklektismenya. Sebuah bangsa memang lahir melalui proses (dalam tanda kutip) “melupakan”. Di satu sisi ia mengatasi rasa ketidak-berdayaan yang ditinggalkan penjajahan Belanda. Di sisi lain ia hasil dari “*imagining*” – untuk mengikuti Benedict Anderson -- membentuk citra, tentang sebuah identitas baru dengan melepaskan apa yang dihayati sebagai identitas lama: Indonesia yang tidak sama dengan Jawa atau Sunda atau Minang.

Paradoks ini mengingatkan kita akan seorang tokoh lagi: Kartini. Kartini telah mempelopori sebuah kesadaran identitas diri yang merupakan dasar nasionalisme Indonesia kelak, yang tidak berdasarkan identitas etnik atau budaya yang permanen. Bisa jadi Kartini mendahului pemikiran kaum nasionalis di Indonesia yang kemudian datang: nasionalisme yang berdasarkan sifat universal manusia.

Kartini menunjukkan bahwa tuntutan untuk merdeka juga bisa datang dari seorang perempuan Jawa, ketika perempuan itu tertindas. Tuntutan itu universal, bisa datang dari semua bangsa di muka bumi. Dan ini semua hanya bisa dikemukakan oleh seorang seperti dia, yang selamanya berdiri sebagai “Yang Lain”, yang bukan ini dan bukan itu. Kartini yang menghayati nilai-nilai emansipasi itu bukan sepenuhnya “Timur” tapi bukan pula “Barat”. Dengan kata lain, identitasnya tidak dikurung dalam sesuatu yang partikular.

Hadirin yang terhormat,

Kartini, demikian juga semangat nasionalisme, adalah tanda bahwa identitas mengalir, berubah dan menyerap dari sana sini. Ia tak pernah baku, atau tunggal, melainkan selalu mengelak dari upaya-upaya untuk mendirikan batas atau menutup diri, entah lewat formalisasi, penyeragaman, apalagi pemaksaan nilai-nilai sebuah golongan (apalagi yang belum tentu merupakan mayoritas) ke golongan lainnya.

Beberapa tahun yang lalu ada Parade Penari Tayub di Solo untuk menentang rancangan undang-undang pornografi. Sebagai perempuan, saya menganggap Tayub menyiratkan eksploitasi perempuan. Namun, lewat aksi itu, para penari Tayub itu seakan hendak mengingatkan kita tentang budaya abangan, yang kini mulai pudar. Mereka menunjukkan bahwa ada ‘Jawa’ yang lain yang dicoba direpresi. Sikap orang Indonesia dari Bali dan Papua yang menolak aturan yang anti-pluralisme itu juga menandakan hal yang sama: bahwa menjadi orang Indonesia adalah menjadi orang yang terbiasa hidup dengan perbedaan.

Pengalaman ketiga: Pada perayaan Hari Pancasila tanggal 1 Juni 2006, koor Universitas Indonesia menyanyikan sejumlah lagu nasional. Mengikuti acara yang disiarkan di radio itu banyak penonton menangis. Pada saat-saat seperti itu, kita memaknai ulang kata-kata tersebut justru karena kita merasa kebhinekaan kita terancam, persatuan kita terlumpuhkan. Justru karena kita tak ingin Tragedi Mei 98—sebuah horor anti-pluralisme—berulang, justru karena kita tak ingin Kekerasan Monas 2008 terjadi lagi, kita merasa butuh akan apa yang dibawakan Pancasila itu – Pancasila yang selama bertahun-tahun diculik oleh Orde Baru untuk dikuasai sendiri.

Kita layak bersyukur, kita masih merindukan persatuan dalam perbedaan itu. Semenjak Boedi Oetomo mendirikan Jong Sumatranen Bond pada tahun 1917, dan yang lalu disusul oleh Jong Jong lainnya hingga Sumpah Pemuda, semangat inklusif itu telah terpancang bagi batu peradaban. Saat itu, nasionalisme Indonesia, sebagaimana yang akhirnya diresmikan setelah Reformasi – ketika perbedaan antara “pribumi” dan “non-pribumi” ditiadakan dalam konstitusi yang disahkan di tahun 1999 -- telah mengatasi dasar-dasar etnis ini.

Sejalan dengan ini, Indonesia tak menyebut dirinya negeri sekuler, tapi negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini juga tak pernah memproklamkan dirinya Negara Islam. Semakin tak lakunya partai-partai yang mengusung ke-Islaman adalah testimoni bahwa Indonesia begitu besar.

Hadirin yang saya hormati,

Batas senantiasa berubah, dan dengan demikian acuan-acuan kita tentang diri kita sendiri pun berubah pula.

Dalam konteks tersebut, generasi saya acap mendengar dua pertanyaan: Benarkah, seperti dikeluhkan orang tua, patriotisme anak muda meluntur? Dan dalam persaingan-persaingan internasional, bisakah kita percaya ada takdir yang menentukan bahwa Indonesia akan terpuruk selama-lamanya?

Kita tahu bahwa media massa hidup dari berita-berita tentang kejadian yang tidak lazim, tidak rutin, dan seringkali dramatis. Tapi kita tahu bahwa dalam kenyataannya, Indonesia tidak hanya itu. Indonesia lebih dari sekedar berita buruk.

Semenjak tahun 1999, republik ini bahkan telah merupakan negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sekaligus sebuah demokrasi yang hidup, di mana media massa tidak disensor, di mana perdebatan pikiran berlangsung leluasa dan kehidupan kesenian praktis tumbuh tanpa kekangan. Pemuda-pemudi republik mencapai prestasi unggul di bidang kegiatan ilmiah dalam perlombaan internasional; pelbagai bentuk teknologi baru diciptakan.

Dari semua itu, saya merasakan ada dua macam patriotisme: patriotisme yang menjunjung tradisi dan nilai-nilai luhur sebuah

bangsa, dan patriotisme yang senantiasa memperbaharui dirinya. Keduanya membutuhkan kerja keras, keterbukaan, rendah hati, dialog, harap.

Dengan memperingati hari kebangkitan nasional hari ini, kita merayakan warisan sejarah bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bangkit dari dan bangga dalam pluralisme.

Laksmi Pamuntjak

Jakarta, 20 Mei 2009